

# EVALUASI PROGRAM *NJUH SEKOLAH MANING* SEBAGAI UPAYA DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

Indriani Noviasuti\*), Kushandajani \*\*)

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang. Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile: (024) 7465407

Laman: [www.fisip.undip.ac.id/](http://www.fisip.undip.ac.id/) Pos-el: fisip@undip.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan jumlah 34.955 anak putus sekolah. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang, pemerintah mengimplementasikan program *Njuh Sekolah Maning* yang menemukan 278 anak tidak sekolah di 5 desa namun yang berhasil kembali bersekolah hanya 26 anak saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan program *Njuh Sekolah Maning* sebagai upaya dalam mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, program *Njuh Sekolah Maning* belum memberikan keberhasilan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan melalui kriteria evaluasi William N. Dunn dalam pelaksanaan program ini terutama pada kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, dan kriteria perataan pada program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pemalang.

**Kata Kunci:** Angka putus sekolah, program *Njuh Sekolah Maning*, Evaluasi

## ABSTRACT

*This research is motivated by the high dropout rate in Pemalang Regency in 2021 with a total of 34,955 children dropping out of school. To overcome the high dropout rate in Pemalang Regency, the government implemented the Njuh Sekolah Maning program which found 278 children out of school in 5 villages but only 26 managed to return to school. The purpose of this research is to see the success of the Njuh Sekolah Maning program as an effort to overcome dropout rates in Pemalang Regency. The research method used in this research is a qualitative case study approach with data collection based on the results of interviews, observation, and documentation. Based on the research results, the Njuh Sekolah Maning program has not provided maximum success in overcoming the problem of dropout rates in Pemalang Regency. This is shown through William N. Dunn's evaluation criteria in the implementation of this program, especially on the effectiveness criteria, efficiency criteria, and alignment criteria in the Njuh Sekolah Maning program in Pemalang Regency.*

**Keywords:** Dropout rate, '*Njuh Sekolah Maning*' program, Evaluation

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan menjadi salah satu pilar penting bagi kualitas kehidupan masyarakat maupun kemajuan suatu wilayah. Berdasarkan pemikiran Ariyani (2018), pendidikan disebut sebagai salah satu bentuk atau cara seseorang untuk menginvestasikan diri di masa yang akan datang karena pendidikan berlangsung seumur hidup. Masyarakat biasanya dapat menilai keberhasilan pendidikan seseorang melalui kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendidikan, pola pikir manusia terhadap suatu fenomena juga akan berubah dan mengalami peningkatan. Meskipun pendidikan juga didapatkan melalui lingkungan keluarga, namun pastinya hal tersebut tidak mencukupi sehingga sekolah menjadi salah satu sarana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan memang memiliki peran yang penting di masa sekarang ini, tetapi kemampuan ekonomi setiap orang berbeda. Jadi tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan formal di sekolah. Apalagi dengan penghasilan dari orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga orang tua memilih untuk mengabaikan memenuhi pendidikan untuk anak mereka atau biasa disebut putus sekolah. Angka putus sekolah dijelaskan bahwa keadaan dimana siswa pada jenjang pendidikan tertentu tidak mampu menamatkan pendidikan. Fenomena anak putus sekolah dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dari pemerintah kepada, serta lingkungan atau pergaulan yang tidak sehat. (Talakua, 2018) Pada dasarnya orang tua sangat menginginkan anaknya untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Namun di sisi lain sebagian diantara mereka merasa bahwa keadaan di sekitar tidak mendukung mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, putus sekolah menjadi jalan satu-satunya yang dapat mereka pilih.

Kabupaten Pemalang berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Brebes yang menempati posisi pertama dengan jumlah angka putus sekolah tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Susenas, angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 memiliki 34.955 kasus anak tidak sekolah. Dalam mengatasi fenomena tingginya angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah membuat berbagai

kebijakan, melalui program yang telah dijalankan di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan dan Bappeda. Mengutip dari website resmi dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang, dalam rangka menurunkan angka putus sekolah ditandai dengan lahirnya sebuah program yang diberi nama “*Njuh Sekolah Maning*”. Program *Njuh Sekolah Maning* mengajak anak putus sekolah untuk kembali bersekolah hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) secara gratis. Pernyataan tersebut didukung dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Pemalang. Program *Njuh Sekolah Maning* telah menjembatani masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tanpa dipungut biaya agar membentuk SDM yang berkualitas tetapi apabila tidak ada kemauan dari masyarakat program ini juga akan sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Pada tahun 2021, program *Njuh Sekolah Maning* baru dilaksanakan di 5 (lima) desa yaitu Desa Sikayu, Desa Karangasem, Desa Randudongkal, Desa Sitemu, Desa Jojogan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim pendata, ditemukan 278 anak tidak sekolah di lima desa. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di 5 desa tersebut diantaranya faktor ekonomi dimana pendapatan setiap bulan hanya bisa mencukupi kebutuhan harian, adanya pernikahan dini, membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dengan upah, bekerja tanpa upah, akses untuk menuju sekolah yang cukup sulit dan terlalu jauh dari rumah, terlalu asik bermain game atau HP sepanjang hari, dan lainnya.

Dari total 278 anak tidak sekolah di 5 desa tersebut, pemerintah hanya berhasil membawa 26 anak untuk kembali lagi ke sekolah. Tentunya itu hanya sebagian kecil jumlah anak tidak sekolah pada kelima desa tersebut. Apalagi di Desa Sikayu tidak terdapat anak yang kembali ke sekolah. Alasan sedikitnya anak yang mau kembali ke sekolah adalah masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan yang rendah akan pendidikan. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pemalang akan pendidikan juga menjadi faktor sedikitnya anak yang kembali ke sekolah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan program *Njuh Sekolah Maning* sebagai upaya dalam mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Evaluasi Program *Njuh Sekolah Maning* Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan memeriksa secara subjektif dan menyoroti suatu kasus tertentu untuk diperhatikan dan dibedah secara cermat hingga tuntas. Peneliti akan berusaha untuk mengilustrasikan dan mendeskripsikan serta menginterpretasikan sejara jelas dan tepat mengenai pelaksanaan program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang dirancang dalam rangka mengurangi fenomena angka putus sekolah. Pencarian informasi dan data yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber melalui wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, yang berlokasi di Jln. Jend. Sudirman Tim. No. 64, Wanarejan Utara, Pemalang
2. PKBM Cahya Mulya, yang berlokasi Jln. Korma No. 1, Penggarit, Pemalang
3. PKBM Sanggar 21, yang berlokasi di Jln. Raya Watukumpul No. 9, Watukumpul, Pemalang
4. PKBM Tunas Jaya, yang berlokasi di Jln. Lap. Olahraga Randudongkal, Randudongkal, Pemalang

Data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait. Narasumber untuk penelitian ini adalah *Person In Charge* (PIC) ATS di Bappeda Kabupaten Pemalang, pengajar atau mentor di PKBM Cahya Mulya, PKBM Sanggar 21, dan PKBM Tunas Jaya, serta masyarakat yang mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* tahun 2021.

## KERANGKA TEORI

### A. Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “*evaluation*” yang artinya penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan sistem penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi dijadikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan dari objek. (Husein, 2017) Evaluasi dapat digunakan sebagai antisipasi dari penerapan objek atau memperkirakan dampak yang dimiliki dari objek dan kegiatan yang diagendakan pada lingkungan. Kemudian, mengidentifikasi efek-efek atau hasil (bersifat sementara) guna menyediakan informasi yang relevan pada proses yang telah diagendakan pada suatu titik dan tahap ketika informasi terkait dapat digunakan untuk menyesuaikan, membenarkan, atau mengarahkan kembali proses implementasi. Terakhir, untuk mengukur efek kegiatan yang berlangsung dan mengidentifikasi dengan menggunakan indikator yang tepat. (Setyawan, 2019)

Sebuah kebijakan tentunya memiliki tahapan yang relative panjang guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari input kebijakan, proses atau aktivitas serta hasil atau *output*, dan *outcome*. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa indikator yang dipergunakan guna mengetahui konsekuensi secara langsung yang dirasakan oleh kelompok target sebagai dampak dari adanya realisasi aktivitas, kegiatan, pendistribusian bantuan, subsidi serta lainnya yang akan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Dunn menyebutkan beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan:

#### 1. Efektivitas

Berkaitan dengan rasionalitas teknis dengan mengukur pelayanan dari suatu kebijakan atau program yang telah dirancang dapat mencapai hasil (dampak) yang diperlukan dan mencapai tujuan dari kebijakan atau program atau tidak.

#### 2. Efisiensi

Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian layanan suatu kebijakan atau program yang diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya minimum untuk mencapai efektivitas yang tinggi.

### 3. Kecukupan

Berkaitan dengan efektivitas suatu kebijakan atau program dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan. Kecukupan digunakan untuk mengukur seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

### 4. Perataan

Berkaitan dengan keadilan dimana dalam mendistribusikan kebijakan atau program yang diperoleh oleh sasaran harus adil. Penyelenggaraan kebijakan tentunya harus bersifat adil untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga hasil dari suatu kebijakan dapat dinikmati bersama-sama.

### 5. Responsivitas

Responsivitas berarti tanggapan dari target kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui respon masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah memprediksi dampak yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut dilaksanakan, dan respon masyarakat setelah dampak dari kebijakan tersebut telah bias dirasakan dalam bentuk positif seperti dukungan maupun bentuk negative seperti penolakan.

### 6. Ketepatan

Berkaitan pada nilai atau harga yang berasal dari tujuan kebijakan atau program serta pada kuatnya perkiraan yang melandasi tujuannya. Ketepatan atau akurasi dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya apabila ada. Misalnya dampak lain yang tak terduga di masa lalu yang bersifat positif atau negative atau dianggap lebih baik daripada alternative lain dari suatu implementasi kebijakan supaya kebijakan dapat bergerak lebih maju atau memberikan pengaruh lain.

## B. Putus Sekolah

Peserta didik yang mengalami putus sekolah harus berhenti mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Siswa menjadi terlantar dari lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kondisi ekonomi yang kurang menunjang biaya pendidikan, lingkungan yang tidak mendukung, dan lainnya. Anak yang putus sekolah biasanya mengalami kondisi dimana orang tua yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang kurang serta

mengabaikan tumbuh kembang anaknya tanpa memikirkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak terutama pendidikan yang layak. (Asmara & Sukadana, 2016) Sehingga banyak anak yang harus putus sekolah dan menganggap sekolah bukanlah suatu kewajiban.

Pada penelitian Mujiati, dkk (2018) mengungkapkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang mengakibatkan terbentuknya pola pikir mengenai tidak pentingnya pendidikan, tingginya biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang berasal dari latar belakang tidak mampu memutuskan untuk berhenti sekolah, minat anak terhadap bersekolah yang masih rendah, kondisi lingkungan sekitar atau tempat tinggal dengan sarana yang terbatas menuju sekolah, dan rendahnya pendidikan dalam pandangan masyarakat karena menurutnya pendidikan bukan prioritas.

Adanya siswa yang putus sekolah tidak selalu datang secara sendiri menimpa siswa tersebut. Pasti terdapat alasan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut. Menurut Mujiati (2018), alasan utama terjadinya putus sekolah antara lain:

a. Faktor ekonomi.

Yang sering terjadi di lapangan adalah orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan anaknya yang semakin meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Selain itu, kebutuhan rumah tangga juga meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini akan mendesak siswa untuk turut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan harian sehingga dengan terpaksa siswa harus bekerja dan sekolah.

b. Lingkungan

Lingkungan sekitar tempat tinggal juga menentukan pilihan siswa untuk melanjutkan sekolah atau tidak. Apabila seseorang tinggal di lingkungan yang banyak siswa putus sekolah untuk bekerja ataupun alasan lainnya, maka prosentase orang tersebut untuk putus sekolah lebih besar karena orang tersebut mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar.

c. Faktor dari dalam diri sendiri

Perasaan malas ini datang ketika sudah merasa nyaman dengan kegiatannya seperti bermain game ataupun bekerja sehingga membuat anak kehilangan gairah untuk meneruskan belajar sekolah. Adanya rasa malas ini membawa seseorang untuk fokus dengan satu kegiatan saja sehingga kegiatan yang lainnya terabaikan.

- d. Kondisi fisik atau infrastruktur sekolah yang terbatas dan jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu jauh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kurangnya Kesadaran Masyarakat pada Pelaksanaan Program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021**

Program *Njuh Sekolah Maning* merupakan salah satu program yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan tujuan untuk memberantas anak yang mengalami putus sekolah. Program ini dibentuk sejak tahun 2020, namun pemerintah Kabupaten Pematang Jaya baru menerapkannya di tahun 2021. Sementara itu, kesekretariatan program ini berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pematang Jaya. Program *Njuh Sekolah Maning* mengajak anak putus sekolah untuk kembali bersekolah hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) secara gratis. Pernyataan tersebut didukung dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Pematang Jaya. Pada Perbup tersebut telah dijelaskan mengenai maksud dari rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun untuk setiap lapisan masyarakat di Kabupaten Pematang Jaya terutama bagi anak yang belum mengikuti pendidikan maupun bagi anak di usia sekolah yang mengalami putus sekolah baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pematang Jaya serta membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan minimal hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Untuk mendapatkan data masyarakat yang putus sekolah, pemerintah Kabupaten telah menyiapkan tim pendata yang telah diberi pelatihan. Tim pendata ini berada di setiap desa yang menjadi sasaran program. Bersama dengan pemerintah desa, tim pendata mendatangi setiap rumah di desa untuk mencatat anak putus sekolah setiap Kartu Keluarga (KK). Ketika data telah ditemukan, tim pendata bersama pemerintah desa melakukan konfirmasi ulang kepada masyarakat mengenai program *Njuh Sekolah Maning* dan kesediaan masyarakat untuk mengikuti program ini. Masyarakat dikumpulkan di balai desa guna mendapatkan sosialisasi seputar program *Njuh Sekolah Maning* dari *Person In Charge* (PIC) program ini. Masyarakat yang

mengikuti program ini mendapatkan bantuan beasiswa berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta dengan perantara desa maupun pihak sekolah. Bantuan ini berupa uang tunai dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan tingkat sekolah setiap anak antara lain untuk paket A atau Sekolah Dasar (SD) Rp. 1.000.000, paket B atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 1.250.000, dan paket C atau Sekolah Menengah Pertama (SMA) Rp. 1.500.000.

Pada tahun 2021, program *njuh sekolah maning* baru dilaksanakan di 5 (lima) desa yaitu Desa Sikayu, Desa Karangasem, Desa Randudongkal, Desa Sitemu, Desa Jojogan. Berdasarkan data, pemerintah menemukan 278 anak tidak sekolah tersebar di lima desa. Jumlah anak tidak sekolah tertinggi yaitu Desa Randudongkal sebanyak 126 anak sedangkan jumlah anak tidak sekolah terendah yaitu Desa Sikayu sebanyak 12 anak. Tentunya itu hanya sebagian kecil anak tidak sekolah yang baru ditemukan di Kabupaten Pemalang. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di 5 desa tersebut diantaranya faktor ekonomi dimana pendapatan setiap bulan hanya bisa mencukupi kebutuhan harian, adanya pernikahan dini, membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dengan upah, bekerja tanpa upah, membantu orang tua untuk mengasuh adik, terlalu asik bermain game atau HP sepanjang hari, kurangnya fasilitas penunjang belajar, pergaulan yang tidak disertai dengan pengawasan dari orang tua, dan kurangnya dukungan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan sehingga memilih untuk menghentikan pendidikan anak.

Dari data tersebut kemudian pemerintah melakukan konfirmasi kembali bagi masyarakat yang memiliki kemauan untuk kembali bersekolah. Pemerintah berusaha untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi program *Njuh Sekolah Maning* yang dilaksanakan di balai desa masing-masing. Masyarakat yang ingin kembali bersekolah hanya membutuhkan ijazah sebagai syarat utama untuk mengikuti program *Njuh Sekolah Maning*. Pada tahun 2021, beberapa masyarakat yang memiliki kemauan untuk kembali bersekolah memiliki hambatan seperti ijazah yang masih di tahan pihak sekolah dan administrasi sekolah yang belum dibayarkan. Pemerintah bersedia menemui pihak sekolah untuk meminta ijazah dan akan mengurus administrasi sekolah agar ijazah dapat diambil. Data ATS yang kembali bersekolah pada 5 desa di Kabupaten Pemalang tahun 2021, sebagai berikut.

Selama tahun 2021 dari 278 anak tidak sekolah, pemerintah hanya berhasil membawa 26 anak untuk kembali lagi ke sekolah. Tentunya itu hanya sebagian kecil jumlah anak tidak

sekolah pada kelima desa tersebut. Apalagi di Desa Sikayu tidak terdapat anak yang kembali ke sekolah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan *Person In Charge* (PIC) ATS program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pematang, alasan sedikitnya anak yang mau kembali ke sekolah adalah kurang terbukanya masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut terjadi ketika tim pendata melakukan pendataan ke setiap rumah warga. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesadaran dan kemauan yang rendah akan pendidikan. Meskipun masyarakat yang berasal dari keluarga berada sekalipun ketika mereka sudah tidak memiliki kemauan untuk sekolah dan malas, maka pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak meski sangat disayangkan. Masyarakat sering salah mengira bahwa pendataan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tidak jarang pula masyarakat yang telah menerima bantuan sosial dari pemerintah justru memiliki anak yang putus sekolah sehingga pemerintah bertindak tegas supaya mereka mendukung anak mereka untuk kembali ke sekolah. Program *Njuh Sekolah Maning* telah menjembatani masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tanpa dipungut biaya agar membentuk SDM yang berkualitas tetapi apabila tidak ada kemauan dari masyarakat program ini juga akan sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Bagi masyarakat yang telah terdaftar mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* di tahun 2021 lebih banyak yang memilih di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dibanding di sekolah formal. Hal ini disebabkan karena waktu pembelajaran yang tidak mengharuskan mereka untuk berangkat setiap hari. Beberapa masyarakat yang kembali bersekolah juga ada yang bekerja sehingga pihak PKBM sebagai lembaga pendidikan non formal mengikuti jadwal dari peserta didiknya dimana pembelajaran dilaksanakan hanya pada hari Jumat dan Sabtu. Pada tahun 2021, beberapa PKBM menggunakan pembelajaran secara *online* karena pandemic covid. Sementara itu, pada PKBM Cahya Mulya masih menerapkan pembelajaran *luring* namun pihak PKBM membatasi hari pembelajaran dimana hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu. Buku penunjang pembelajaran telah disediakan oleh PKBM dalam bentuk modul secara gratis sehingga peserta didik tidak perlu membelinya.

## **Rendahnya Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

Evaluasi Pelaksanaan Program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 akan dilihat dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi yang diungkapkan oleh William N. Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Dan Ketepatan.

### **1) Ketercapaian Tujuan**

Pencapaian keberhasilan suatu program atau kebijakan publik biasanya berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan. Suatu kebijakan atau program yang telah dirancang guna mendapatkan hasil yang diinginkan meski kebijakan tersebut telah dirumuskan serta diimplementasikan, apabila hasil yang dicapai tidak dapat dirasakan, diamati, juga diukur dan dinikmati oleh rakyat banyak maka program tersebut tidak berarti apapun atau bisa dinilai gagal. (Sudiro, 2018) Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat bahwa efektivitas dari program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pemalang tahun 2021 akan memenuhi kriteria efektivitas apabila telah mencapai goals atau tujuan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Pada dasarnya program *Njuh Sekolah Maning* dirancang atas fenomena tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang sehingga pemerintah merumuskan program ini yang memiliki tujuan untuk mengembalikan anak putus sekolah agar dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya di sekolah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang.

Melihat output dari program ini, secara garis besar pihak terkait telah memahami dan mengetahui adanya program njuh sekolah maning terutama masyarakat yang kembali bersekolah. Program *Njuh Sekolah Maning* memiliki tujuan untuk mengembalikan anak putus sekolah agar dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya di sekolah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang. Menurut mentor atau pengajar di PKBM program ini memang sudah sesuai dengan tujuannya namun belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan data dari tim pendata program *Njuh Sekolah Maning*, jumlah anak putus sekolah yang kembali sekolah di tahun 2021 pada 5 desa adalah 278 orang sedangkan yang berhasil kembali ke sekolah hanya 26 orang. Pada 2022, pemerintah meningkatkan jumlah desa menjadi 25 desa yang mana ditemukan anak putus sekolah yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal

yang sama juga terjadi seperti pada 2021 dimana tidak banyak anak putus sekolah yang kembali ke sekolah meskipun ada sedikit kemajuan.

Mentor atau pengajar maupun pemerintah tidak bisa memaksa anak yang putus sekolah untuk mau kembali sekolah karena ini berdasarkan pada kemauan setiap individu. Apabila anak secara terpaksa mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* dengan kembali bersekolah maka hasilnya akan sama sebab mereka tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan sekolah sehingga pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi mereka yang putus sekolah dan tidak mau kembali ke sekolah. Hal ini menyebabkan sedikitnya anak putus sekolah yang kembali ke sekolah yang membuat tujuan program tidak tercapai. Oleh sebab itu, kriteria efektivitas pada program ini belum terpenuhi.

## 2) Pemanfaatan Biaya

Efisiensi memiliki hubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian layanan suatu kebijakan atau program yang diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya minimum untuk mencapai efektivitas yang tinggi. Tak hanya biaya, efisiensi juga berkaitan dengan waktu pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan dan kualitas dari pelaksanaan program. Suatu program akan dikatakan telah dilaksanakan dengan baik apabila diantara unsur-unsur tersebut terpenuhi. (Sudiro, 2018)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pematang Siantar sebagai penyelenggara program *Njuh Sekolah Maning* menyebutkan telah menganggarkan biaya untuk program ini pada tahun 2021. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk pendampingan pendataan saja. Tim pendata dihargai Rp. 3.000,00 per kartu keluarga di 5 desa. Sedangkan untuk bantuan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program ini dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau CSR seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan beasiswa ini berupa uang tunai dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan tingkat sekolah setiap anak antara lain untuk paket A atau Sekolah Dasar (SD) Rp. 1.000.000, paket B atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 1.250.000, dan paket C atau Sekolah Menengah Pertama (SMA) Rp. 1.500.000. Beasiswa ini diberikan langsung kepada peserta program *Njuh Sekolah Maning* sesuai dengan data tanpa melalui perantara.

Dari kerja sama tersebut, biaya yang dikeluarkan Bappeda hanya digunakan untuk melakukan pendampingan pendataan saja dan tidak menyentuh bantuan beasiswa. Mengingat pada Pasal 19 Perbup Kabupaten Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 perihal Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun dimana sumber biaya berasal dari APBDes, APBD Kab, APBD Prov, APBN dan sumber lainnya, tentu saja pemerintah memiliki biaya yang lebih tinggi. Untuk tim pendata yang dihargai hanya sebesar Rp. 3.000,00/ kk adalah angka yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan sumber-sumber biaya untuk program ini. Sementara pemerintah juga tidak turut mengeluarkan biaya untuk bantuan beasiswa dan mengandalkan kerja sama dengan pihak ketiga saja. Melihat penggunaan biaya yang belum diketahui penggunaannya secara keseluruhan, dana pendukung program *Njuh Sekolah Maning* yang digunakan di 5 desa pada tahun 2021 dapat dikatakan cukup banyak dan ditambah dengan dana-dana dari sumber terkait lainnya. Dari sekian banyaknya dana, pemerintah hanya menghargai tim pendata Rp. 3.000/kk saja. Apabila dibandingkan dengan sumber dana yang cukup banyak pasti itu adalah jumlah yang sangat kecil.

### **3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Kecukupan menjadi salah satu indikator evaluasi dengan melihat sudahkah permasalahan yang ada diselesaikan ataupun bagaimana masyarakat merasa bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi melalui program atau kebijakan ini. Untuk melihat apakah program *Njuh Sekolah Maning* telah memenuhi kriteria kecukupan atau tidak yaitu dengan melihat sarana dan prasarana penunjang dalam pembelajaran di PKBM. (Setyawan, 2019)

Di tahun 2021 PKBM dijadikan sebagai salah satu sarana untuk para siswa yang putus sekolah yang mengikuti program *Njuh Sekolah Maning*. Pemerintah berusaha memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang mengikuti program *Njuh Sekolah Maning*. Terdapat 3 PKBM dalam penelitian ini yang menjadi tempat pembelajaran untuk anak-anak putus sekolah yang mengikuti program ini. Satu PKBM memiliki bangunan sendiri sedangkan 2 PKBM lainnya harus menggunakan bangunan-bangunan yang difasilitasi dari pemerintah misalnya seperti sekolah dasar sehingga untuk sarana dan prasarana di PKBM hampir sama dengan sarana dan prasarana di sekolah

formal lainnya seperti komputer, buku pendamping pembelajaran atau modul, dan lainnya.

Ada beberapa PKBM yang letaknya jauh dari jalan utama serta kondisi jalan yang jauh dari kata baik sehingga hal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan ketika akan pergi ke PKBM salah satunya PKBM Sanggar 21. Berdasarkan wawancara penulis ketika tiba di PKBM Sanggar 21 memang membutuhkan waktu kurang lebih satu jam dari jalan utama disertai dengan kondisi jalan yang rusak. Menurut kepala PKBM Sanggar 21 menerangkan karena hal tersebut pihak PKBM mengajak pemerintah desa untuk memfasilitasi tempat baik di balai desa ataupun rumah kepala desa serta transportasi sehingga mentor atau pengajar PKBM yang akan ke tempat diadakannya pembelajaran apabila dilakukan di luar PKBM.

Sarana dan prasarana untuk program *Njuh Sekolah Maning* tidak di sediakan dari pihak Bappeda karena dalam hal ini langsung berhubungan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang. Apabila terdapat kekurangan untuk sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, maka pihak PKBM dapat mengatakan hal tersebut kepada dinas pendidikan dan kebudayaan sebab PKBM adalah lembaga pendidikan non formal sehingga ini menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Namun beberapa mentor atau pengajar di PKBM telah mengatakan bahwa sejauh ini sarana dan prasarana di PKBM sudah cukup meskipun belum mencapai 100%.

#### **4) Pemerataan Program**

Perataan berkaitan dengan keadilan dimana dalam mendistribusikan kebijakan atau program yang diperoleh oleh sasaran harus adil. Keadilan menjadi kunci utama dalam perataan. Penyelenggaraan program atau kebijakan tentunya harus bersifat adil untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga hasil dari suatu kebijakan dapat dinikmati bersama-sama. Program *Njuh Sekolah Maning* memang memberikan banyak manfaat untuk anak yang harus mengalami putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap dengan adanya program ini akan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Faktanya, di tahun 2021 hanya 5 desa saja yang menjadi sasaran untuk program ini oleh pemerintah.

Meskipun pelaksanaan program *Njuh Sekolah Maning* yang baru dilaksanakan di 5 desa tersebut hanya dapat membawa 26 anak untuk kembali ke sekolah tetapi

setidaknya pemerintah telah berusaha untuk mengajak mereka yang putus sekolah agar kembali bersekolah. Sedikitnya anak putus sekolah yang kembali ke sekolah tentunya hanya memberikan sedikit perubahan pula untuk tingkat angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Di tahun berikutnya pemerintah akan terus menambahkan desa-desa yang lainnya di Kabupaten Pemalang agar pelaksanaan program ini dapat diselenggarakan secara merata dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Pelaksanaan program *Njuh Sekolah Maning* yang hanya dilaksanakan di 5 desa tersebut membuat program ini tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik karena hanya sebagian kecil saja masyarakat putus sekolah yang didata oleh pemerintah begitu pula dengan masyarakat yang kembali ke sekolah. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa sangat menyayangkan program ini yang baru dilaksanakan di 5 desa di tahun 2021 sehingga tujuan dari program belum tercapai dan manfaat dari program ini juga tidak bisa dirasakan masyarakat secara luas.

#### **5) Representasi Kebutuhan Masyarakat**

Responsivitas berarti tanggapan dari target kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu program atau kebijakan dapat dilihat melalui respon masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah melihat sejauh mana program atau kebijakan ini memberikan dampak untuk lingkungan sekitarnya apabila program atau kebijakan tersebut telah dilaksanakan, dan masyarakat dapat meresponnya baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap program atau kebijakan tersebut. Respon masyarakat yang mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pihak pelaksana.

Adanya program *Njuh Sekolah Maning* sangat menguntungkan terutama bagi masyarakat yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi. Masyarakat dapat melanjutkan sekolah hingga lulus SMA secara gratis. Apalagi mereka juga mendapatkan bantuan beasiswa setiap tahunnya. Berbicara mengenai kepuasan, dari beberapa informan yang mengikuti program ini dan telah diwawancarai oleh penulis mereka mengatakan bahwa suatu keberuntungan bagi mereka dapat melanjutkan sekolah kembali yang sebelumnya sempat tertunda. Mereka merasa program ini membawa pengaruh dalam kehidupan mereka.

Masyarakat yang mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* merasa cukup puas dengan program ini. Selain dapat memenuhi hak mereka akan pendidikan, program ini juga membantu dalam memperbaiki kehidupan mereka. Apabila mereka sekedar lulusan tingkat SD atau SMP untuk mendapatkan pekerjaan cukup sulit yang hanya akan berujung menjadi pekerja buruh lepas dengan gaji yang tidak tetap. Sementara itu, jika lulusan SMA setidaknya pekerjaan yang mereka miliki akan lebih baik yang hanya untuk lulusan SD atau SMP. Program ini mendapatkan sambutan yang baik terutama bagi masyarakat yang memiliki kemauan untuk bersekolah kembali namun tidak semua orang yang putus sekolah mau kembali bersekolah.

Program *Njuh Sekolah Maning* merepresentasikan keinginan masyarakat yang mengalami putus sekolah dapat kembali bersekolah dan dapat menuntaskannya hingga setara SMA. Mereka merasa program ini adalah program yang tepat karena melalui program *njuh sekolah maning* mereka dapat merasakan bersekolah kembali setelah mengalami putus sekolah secara gratis. Program ini memberikan kepuasan yang cukup bagi masyarakat dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan memperbaiki masa depan masyarakat.

#### **6) Ketepatan Program Mengatasi Angka Putus Sekolah**

Ketepatan berkaitan pada nilai atau harga yang berasal dari tujuan kebijakan atau program serta pada kuatnya perkiraan yang melandasi tujuannya. Program atau kebijakan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sasaran. Penyelenggaraan program *Njuh Sekolah Maning* dalam mengatasi peningkatan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang sudah tepat dan sesuai dengan tujuan dari program ini

Tujuan program *Njuh Sekolah Maning* adalah untuk mengembalikan anak putus sekolah agar dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya di sekolah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang. Fenomena angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang berada di peringkat 2 se-Jawa Tengah pada tahun 2021 menjadi hal utama yang melatar belakangi adanya program ini untuk membantu masyarakat sehingga dapat membantu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan IPM Kabupaten Pemalang. Melihat dari output program *njuh sekolah maning* yang saat ini dilaksanakan di puluhan desa di Kabupaten Pemalang menjadi salah

satu upaya pemerintah untuk mengatasi anak putus sekolah. Masyarakat yang memiliki kemauan untuk bersekolah tapi memiliki keterbatasan biaya menjadi senang dapat bersekolah kembali. Dengan didukung pernyataan dari beberapa narasumber bahwa pada awalnya mereka harus putus sekolah karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan sekolah dan sekarang mereka bisa kembali bersekolah secara gratis di PKBM juga mendapatkan bantuan beasiswa setiap tahunnya.

Masyarakat usia sekolah yang mengalami putus sekolah dijadikan kelompok sasaran pada program ini. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Jadi pemerintah melakukan pendataan masyarakat putus sekolah dan melakukan sosialisasi ke setiap desa dengan harapan dapat mengembalikan anak putus untuk kembali bersekolah. Selama masyarakat tergolong sebagai anak tidak sekolah, mereka dapat mengikuti program ini apabila dari diri mereka memang ada kemauan untuk kembali ke sekolah.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Evaluasi program *Njuh Sekolah Maning* di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 akan dikatakan berhasil apabila telah memenuhi kriteria evaluasi. Melihat pada 6 kriteria evaluasi, dapat disimpulkan bahwa program ini belum berhasil dalam memenuhi 3 kriteria evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator evaluasi kebijakan, antara lain (1) kriteria efektivitas dalam ketercapaian tujuan program *Njuh Sekolah Maning* belum tercapai sepenuhnya dengan kata lain masih memiliki kekurangan terlebih program ini pada tahun 2021 hanya dilaksanakan di 5 desa dan dari 5 desa tersebut terdapat 4 desa yang masyarakatnya mau kembali ke sekolah dengan jumlah yang sedikit sehingga lebih banyak masyarakat yang tidak mau kembali ke sekolah. (2) kriteria efisiensi atau pemanfaatan biaya, untuk program *Njuh Sekolah Maning* memiliki sumber dana yang berasal dari beberapa pihak namun pemerintah hanya mengeluarkan sedikit biaya saja sehingga efektivitas yang diperoleh sangat rendah. (3) kriteria pemerataan program, pelaksanaan program *Njuh Sekolah Maning* belum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dibuktikan dengan pada Tahun 2021 hanya dilakukan di 5

desa di Kecamatan yang berbeda sehingga masih banyak anak putus sekolah yang belum diketahui.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan pelaksanaan program tersebut diperlukan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan di masa depan, sehingga pemerintah perlu membangun kerja sama yang lebih kuat dengan masyarakat melalui pemerintah di tingkat desa untuk memberikan sosialisasi singkat tentang pentingnya pendidikan dan mengenai program ini dengan memberikan bukti atau contoh nyata masyarakat yang telah mengikuti program *Njuh Sekolah Maning* untuk menarik perhatian masyarakat dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di masa depan. Hal tersebut disertai dengan keterbukaan masyarakat untuk program *Njuh Sekolah Maning* terhadap pemerintah perlu ditingkatkan karena dengan masyarakat yang terbuka mengenai kondisi dan permasalahan mereka, maka pemerintah akan membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pemerintah juga perlu memperhitungkan secara matang dan transparansi mengenai pembiayaan program untuk mendukung keberhasilan program ini dan memberikan efektivitas yang maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aristin, N. F. (2016). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anak putus sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1).
- Ariyani, S. N. Q. (2018). Tren Angka Putus Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 7(4), 440-451.
- Asmara, Y. R. I., & Sukadana, I. W. (2016). Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi?(Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali). *EJ. EP Unud*.
- Atmoko, A. T., & Widayati, W. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Siswa Putus Sekolah Tingkat Menengah Di Kabupaten Batang. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 96-115.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama

- Gunawan, Ary H. 2010. *Sosiologi Pendidikan suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Husein, M. T. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 13(1).
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Leo, Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mujiati, M., Nasir, N., & Ashari, A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3).
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 11-17.
- Nugroho., Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Pematang
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Sa'adah, F., Sarifah, I., & Imaningtyas, I. (2022). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Mengurangi Putus Sekolah di DKI Jakarta. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(5), 6617-6624.
- Setyawan, D. (2019). Evaluasi Program Inovasi Pelayanan Malam ( Studi Pada Kantor Kelurahan Temas Kota Batu ). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(25), 17–21.
- Sudiro. 2018. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Teori, Konsep, dan Implementasi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*. Lontar Mediatama. Yogyakarta.
- Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1-16.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Uriyalita, F., & Syahrodi, J. 2020. Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179-199.